

**STATUS DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
DESA BARAN MELINTANG KECAMATAN PULAU MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh : Said Ridho Amal

Email: said.ridho38@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Syamsul Bahri M.Si

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupatn Kepulauan Meranti dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang Pelaksanaan Peranan Badan Permusyawaratan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja peranan BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam mengsucceskan pembangunan pada tahun 2014 yang lalu di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kaupaten Kepulauan Meranti ? (2) Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra kerja Kepala Desa di Desa baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Judul penelitian ini adalah **“Status dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Baran Melintang Keamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif selanjutnya di gambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara langsung kepada responden. Karena jumlah masyarakat di Desa Baran Melintang jumlahnya banyak sekali maka digunakan teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 47 orang. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, diolah dengan menggunakan tabel frekuensi dengan persentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baran melintang tidak berperan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan rendah nya penilaian responden dari setiap pelaksanaan peran BPD Baran Melintang dan kurang nya perhatian dari Pemerintah Kabupaten terhadap faktor yang menghambat pelaksanaan peran BPD.

Kata Kunci: Status Peran (BPD)

**CONSULTATIVE STATUS AND ROLE OF AGENCY VILLAGE (BPD)
VILLAGE BARAN MELINTANG KECAMATAN PULAU MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

By: Amal Said Ridho

E-mail: said.ridho38@gmail.com

Supervisor: Drs. Syamsul Bahri M.Si

**Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, University of Riau
Campus Bina Widya Km. 12.5 Baru Simpang, Pekanbaru 28293**

ABSTRACT

This research was conducted in the village of Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti in order to obtain information about the role of the Implementation of the Village Consultative Body. Problems in this study were (1) A BPD role as a partner in the Village Head support the success of development in 2014 ago in the village of Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti? (2) What factors influence the implementation of the BPD's role in carrying out its function as a partner in the Village barrage of Village Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. The title of this research is "Status and Role of the Village Consultative Body (BPD) in the village of Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti". This research is a quantitative descriptive described hereinafter in accordance with the actual situation. The collection of data through observation and direct interview to the respondent. Because the number of people in the village of Baran Melintang Across all the numerous techniques used sampling using purposive sampling technique is a technique determination of sample with a certain consideration. The number of samples in this study as many as 47 people. The data collected from the research results, processed using frequency tables with percentages. The results showed that the role of the Village Consultative Body in the village of Baran Melintang did not act well, this is evidenced by its lower respondents' assessment of each implementation role Transverse BPD Baran Melintang and his lack of attention from the local government of the factors that hinder the implementation of the role of BPD.

Keywords: Status Role (BPD)

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Untuk pelaksanaan pembangunan itu, kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengatur sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tidak lain berangkat dari konteks empirik dan berpijak pada idealisme desentralisasi yang telah ditanamkan oleh para *funding father* Indonesia serta anjuran akademik yang berkembang secara global di muka bumi. (Bahtiar, 2010 : 1).

Baran Melintang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi Riau, Indonesia. Baran melintang adalah sebuah desa yang terletak di Pulau merbau kecamatan Pulau Merbau, kabupaten Kepulauan Meranti. Luas wilayah 56 Km sebelah utara berbatasan dengan Selat malaka, timur berbatasan dengan Desa Renak Dangun(Ibukota Kecamatan Pulau Merbau)dan Kuala Merbau, Selatan berbatasan Dengan Desa Teluk Ketapang dan barat berbatasan dengan Selat Asam. Desa ini juga terletak di seberang ibukota kecamatan Merbau yaitu Teluk Belitung. Desa Baran Melintang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.894 jiwa, laki laki 1432 orang, Perempuan 1464 orang dari KK sebanyak 617. Potensi Desa yang bisa diangkat ialah menciptakan tambak ikan, namun itu baru dalam

tahap rencana dan pelaksanaannya belum. Sementara itu, penghasilan masyarakat di Baran melintang ini adalah dari berkebun karet dan nelayan.

Desa ini mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan desa desa yang lain di Pulau Merbau. Permasalahan transportasi, Ekonomi , jalan, infrastruktur dan pendidikan. namun jika dibandingkan dengan desa desa yang lain di Pulau Merbau, desa ini mempunyai satu masalah yang sangat memprihatinkan, yaitu masalah pendidikan. Permasalahan pendidikan yang memprihatinkan ini disebabkan oleh tidak adanya sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di desa ini.

Desa ini sejak sebelum pemekaran Pemerintah Kabupaten Meranti dari pemerintahan kabupaten Bengkalis memang tidak ada yang namanya SLTA, yang ada cuma SD tiga buah PAUD dua SMP satu dan MDA empat, jadi jika masyarakat ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA harus menyeberangi selat Asam kemudian ke Teluk Belitung.

Sesuai dengan pembangunan alam dewasa ini, masalah-masalah perencanaan desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan aktivitas-aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukan setiap pelaksanaan pembangunan. BPD dan masyarakat adalah aktor utama yang seharusnya melakukan kontrol untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dari

suatu proses pembuatan PERDES hingga evaluasi, sehingga proses tersebut tidak semata-mata didominasi oleh elit-elit di desa dan tentu saja ruang kontrol masyarakat tersebut harus dilegalkan dalam aturan main baik Undang-Undang, PERDA maupun PERDES. Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200 dan pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Pada peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa di jelaskan Bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan kerterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada Pasal 35 peraturan tersebut menjelaskan BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa,
5. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
6. Menyusun tata tertib BPD”.

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD sesuai pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang

dipilih "dari dan oleh penduduk desa" yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. untuk itu, BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 telah memberikan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti berketetapan memilih judul skripsi sebagai berikut “*Status dan Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Untuk memperjelas arah penelitian ini maka perlu diberikan beberapa teori yang mengkaji permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan solusi mengenai permasalahan yang diteliti, agar dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut maka peneliti tentu harus memiliki landasan teori dalam melakukan penelitian. Karena dengan adanya teori maka peneliti akan mudah untuk memperoleh landasan dan kerangka berfikir dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

Konsepsi Peranan

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Chesner L. Hunt yaitu peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:116). Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut, dalam arti tertentu status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Soejono Soekamto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

“Peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”
(Soekamto, 2005:243).

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat dapat menggambarkan *social-institution* tersebut. Istilah lain yang di usulkan adalah bangunan sosial, yang mungkin merupakan terjemahan dari *soziale-gebilde* (bahasa Jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Pemberdayaan dan partisipasi adalah istilah yang sangat erat dengan tujuan pembangunan Sutoro Eko mengatakan (2005:148) bahwa pemberdayaan di pahami sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pihak lain yang juga menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran pengumpulan sumberdaya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena-fenomena sosial tertentu serta berusaha menganalisisnya sesuai dengan kenyataan berdasarkan data yang diperoleh tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan syarat utama untuk melakukan suatu penelitian, karena tanpa adanya lokasi maka penelitian ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seorang peneliti haruslah mempunyai tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Lokasi

penelitian ini dilakukan di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Baran Melintang adalah selain di dukung data yang di peroleh, peneliti juga melakukan penilaian secara objektif tentang kondisi sesungguhnya yang di alami di Desa Baran Melintang ini, karena di Desa Baran Melintang telah terjadi Permasalahan ketimpangan infrastruktur desa yang menyebabkan ketertinggalan budaya pada masyarakat desa tersebut dan kurangnya fasilitas di desa tersebut mempersulit masyarakat melakukan aktifitas demi mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas hidup serta pembngunn dalam segala bidang di desa tersebut, hal lokasi Desa ini juga letak nya cukup jauh dari pusat Kabupaten Kepulauan Meranti berjarak berkisar 60 KM dan peneliti menempuh waktu 2 jam perjalanan.

Populasi Dan Sampel

Populasi menurut M. Hartawijaya (2008:82) menunjuk kepada keseluruhan jumlah orang yng di observasi sedangkan sampel menunjuk pada sebagian dari populasi yang di pilih guna memberikan data yang di harapkan representatif bagi penelitian ini dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa, Masyarakat yang di anggap peneliti terlibat langsung terhadap kinerja Badan Perusyawaratan Desa Baran Melintang, karena hampir seuruh masyarakat Desa Baran Melintang yang terlibat maka peneliti menentukan sendiri dan membagi jumlah responden berdasarkan kelayakan menurut peneliti. Berikut

ini tabel rincian populasi dan sampel penelitian :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

N o	Jenis populasi	Populasi	Persentase (%)	Sampel (Orang)
1	Jumlah Masyarakat Desa Baran Melintang	1.713		
	Jumlah penduduk laki-laki	942	5	47
	Jumlah			47

Sumber Data : Data Olahan 2015

rdasarkan pertimbangan maka penenliti menentukan yang akan di jadikan sampel penelitian ini adalah seluruh nya laki-laki karena menurut peneliti di Desa Baran Melintang laki-laki lebih banyak terlibat di dalam penelitan ini maka tehknik pengambilan sampel yang akan di gunakan didalam penelitian ini ialah *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau sleksi khusus. (Prof. DR. Sugiyono, 2014: 67). Pemilihan yang di maksud ialah penduduk laki-laki yang berjumlah 942 orang dan di ambil 5% dari keseluruhan nya sebagai sampel dengan kisaran umur di atas 20 tahun, 5% dari 942 orang = 47 orang berumur di atas 20 tahun, dan untuk mendapatkan responden penelitian maka di lakukan sampel acak sederhana (*Simpel Random Sampling*).

Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mewakili

masyarakat desa yang mana tugas dari lembaga kemasyarakatan haruslah baik dan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

Tabel 6.1.
Jenis Peraturan Desa Baran Melintang yang Sudah di Tetapkan

No	Jenis Peraturan Desa	Jumlah	Keterangan
1	Peraturan tentang pungutan desa	1	Terlaksana
2	Peraturan tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa	1	Terlaksana

Sumber : Data olahan 2015

Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa, fungsi membahas rancangan peraturan desa ini haruslah dilakukan sebagai mana terantun di dalam tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yang mana hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan BPD di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga masyarakat yang mewakili masyarakat desa dan

juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga perwakilan masyarakat lainnya, namun tidak semua kewenangan antar lembaga masyarakat tersebut juga sama, salah satu fungsi dari BPD Desa adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat.

Tabel 6.2.
Jenis-Jenis Aspirasi yang ditampung dan disalurkan oleh BPD

No	Jenis Aspirasi	Tujuan	Keterangan
1	Perbaikan Jalan Utama	BPD	Selesai
2	Pembentukan panitia Pilkdes	BPD	Selesai

Sumber : Data Olahan 2015

Memberi Persetujuan Pemberhentian sementara Perangkat Desa

Memberi pemberhentian sementara perangkat desa merupakan salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai wewenang untuk memberhentikan sementara perangkat desa, baik itu Kepala Desa, Sekertris Desa, Kaur Desa dan sebagainya hak ini sedikit mirip dengan fungsi BPD mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa namun ada perbedaan yang mendasar, perangkat desa di berhentikan sementara karena dianggap ada kesalahan atau menyalahi aturan yang ada walaupun hal ini jarang terjadi, namun fungsi ini tetaplah

dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tertera di dalam undang-undang.

Menyusun tata tertib BPD

Menyusun tata tertib sangat lah penting tidak bagi sebuah lembaga masyarakat saja namun seluruh kerangka organisasi yang ada di masyarakat, karena dengan adanya tata tertib maka manusia dapat hidup lebih teratur, karena dengan adanya tata tertib manusia merasa terkontrol dan diawasi seketika ia melakukan hal yang di luar tujuan dari organisasi masyarakat tersebut, hal ini juga berlaku di dalam Badan Permusyawaratan Desa khusus BPD di Desa Baran Melintang. Dan untuk mengetahui apakah BPD Baran Melintang sudah pernah membuat tata tertib pada tahun 2014 yang lalu dapat kita lihat di melalui tabel di bawah ini.

Pengawasan BPD dalam Program Pemberdayaan Desa

pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat desa dan untuk membangun desa, fungsi itu dapat mengatur dan mengendalikan roda pemerintahan desa tentunya peran tersebut tidak terlepas dari

pemerintah desa yaitu Kepala Desa perangkat nya yang menjadi pemimpin di desa, namun yang mengajukan rancangan tetapi BPD fungsi ini dapat di sebut juga sebagai fungsi Legislatif.

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Salah satu wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, sama halnya dengan BPD Desa Bran Melintang, secara organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk organisasi karena terdiri dari kumpulan beberapa orang yang melakukan kerjasama untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu organisasi adalah suatu unit yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.

Faktor Lemahnya Sumber Daya Manusia

Maksud dari Sumber Daya Manusia disini adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang di pengaruhi oleh pendidikan, akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerja. Pendidikan merupakan hal pokok yang dapat berperan penting dalam mempengaruhi kualitas pekerjaan, karena pendidikan akan menentukan kualitas dari seseorang dan daya tanggap dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemampuan atau *skill* seseorang dalam pekerjaan dapat di tentukan oleh sumberdaya manusia (SDM) yang menunjang untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di laksanakan.

Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelenggaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, bahkan sejak adanya kemiskinan itu sendiri.

Belum Adanya Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Peran BPD

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang kinerja suatu masyarakat dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai masyarakat dapat melakukan sesuatu lebih efektif dan efisien, dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang maka tidak ada alasan kenapa sebuah organisasi tersebut untuk tidak menjalankan perannya.

Hubungan Antara BPD dengan Kepala Desa

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dimana disebutkan pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, Pola hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik internal antara BPD dan Pemerintah Desa.

Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa peran BPD di Desa Baran Melintang tidak berperan dengan baik, karena adanya faktor-faktor penghambatan peran, juga telah di terangkan di dalam teori peran menurut ahli sosiologi. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut, dalam arti tertentu status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Merantu melalui instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait tahapan-tahapan pembuatan peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, Penataran atau Training.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasionalisasi BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara anggota BPD dengan

Pemerintah Desa dalam pembuatan peraturan desa, serta diperlukan evaluasi dari pihak kecamatan terhadap kinerja dari anggota BPD.

4. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota BPD, baik dari segi pendidikan, maupun pengalaman. Serta perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang penyusunan peraturan desa terutama bagi anggota BPD yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar menambah pemahaman, pengetahuan serta keterampilan para anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.
5. Demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera, perlu adanya hubungan komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Sehingga perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan terkoordinasi dengan terjun langsung ke lapangan ke tengah masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat secara langsung.

Anggota BPD harus mengikutsertakan masyarakat dalam rapat atau pertemuan-pertemuan, agar proses pelaksanaan pembuatan peraturan desa dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat meningkatkan pemahaman dari masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintaro, R. 1983. *Interaksi desa kota dan permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harun, H. Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Jakarta. Rajawali Press Jakarta.
- Horton, B. Paul, & Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi jilid 2*. Jakarta. Erlangga.
- Jhonson, Doyle. Paul. 1993. *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Peranda Media Group.
- Ritzer, George, & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Moderen 2*. Jakarta. Kencana Prenda Media Group.
- Soetardjo. 1948 *DESA*. Jakarta :Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu, & M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokusmedia.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta. APMD Press.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi*. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta. Prenada Media Group.

Skripsi

Aulia Hermawati. 2013. *Analisa Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintah Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelelawan* : Universitas Riau.

Bahtiar. 2010. Skripsi *Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima* : Universitas Negeri Malang.

Rian Juli Purwanti. 2013. *Analisis tentang pelaksanaan otonomi desa terhadap peningkatan pembangunan desa* : Universitas riau.

Internet

Dolvin Rivai. *Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Otonomi Desa*.

<http://gebangbeloved.blogspot.com/2013/03/efektivitas-kerja-badan-permusyawaratan.html>, 12 juni 2014.

_____, (2011). *Sejarah Berdiri*. Form <http://merantikab.go.id/profil-meranti/sejarah.html>, 14 april 2014.

Rdwia. (2009). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis*. Form <http://adf.ly/2356/banner/http://education-lili.blogspot.com/2009/02/fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd.html>, 1 May 2014.

Wagino, (2012). *Baran Melintang, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti*. Form http://id.wikipedia.org/wiki/Baran_Melintang,_Pulau_Merbau,_Kepulauan_Meranti, 24 april 2014.

Data lain

_____, 2011. *Mengatasi Abrasi Merangkai Pulau Menjadikan Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan NKRI*. Kabupaten Kep. Meranti. Pemerintah Kepulauan Meranti. Badan Pengelola Perbatasan.

_____, 2012. *Penyusunan master plan pengembangan wilayah perbatasan*. Kabupaten Kep. Meranti. Pemerintah Kepulauan Meranti Badan Pengelola Perbatasan.